

## **ABSTRAKS**

### **Akbar Febrianto (1148010025): “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Bandung Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan”**

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang pasal 29 ayat 2 mengharuskan ruang terbuka hijau diwujudkan paling sedikit 30% dari total wilayah kota. Penerapan Implementasi Kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Bandung belum sesuai dengan yang peraturan yang ditetapkan. Dimana, ruang terbuka hijau di Kota Bandung pada tahun 2015 terwujud sebesar 12,15% sehingga belum tercapai sesuai peraturan. Penyebab belum optimalnya Implementasi Kebijakan ruang terbuka hijau adalah rendahnya proporsi ruang terbuka hijau, Peluasan ruang terbuka hijau Kota Bandung belum merata, dan pemerintah Kota Bandung kurang melakukan evaluasi terkait standar kinerja pegawai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Kota Bandung dalam penyediaan ruang terbuka hijau dan Faktor apa yang menjadi penghambat bagi penyediaan ruang terbuka hijau Kota Bandung.

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle tahun 1980 dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi.

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendekatan Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara kepada Kepala Bidang dan 3 Kepala Seksi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan yang dilakukan, dapat dilihat dari tabel pertumbuhan ruang terbuka hijau Kota Bandung pada tahun 2016 yaitu sebesar 12,15%. Sehingga Undang-Undang no. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang belum terwujud. Hal ini disebabkan oleh Pemimpin pusat kurang memperhatikan ketersediaan ruang potensi ruang terbuka hijau, Kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau serta proses ruang terbuka hijau, dan belum adanya solusi untuk penanggulangan alih fungsi lahan, sehingga memperlambat dan berpotensi menghentikan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau. Walaupun implementasi kebijakan ruang terbuka hijau dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 pasal 29 ayat 2 menyebutkan ruang terbuka hijau harus diwujudkan sebesar 30% pada kenyataanya belum terwujud.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dan Pembangunan Berkelanjutan.**